ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Praktik Monopoli Jual Beli Reyeng Wadah Ikan Pindang Prespektif Etika Bisnis Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Wilayah Perindustrian Reyeng Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)" ini ditulis oleh 'Yovi Sintya Sulistiyowati, NIM. 126101212159, dengan pembimbing/promotor oleh Hiba Fajarwati, S.H., LL.M.

Kata Kunci : Praktik Monopoli, Reyeng, Etika Bisnis Islam, Hukum Positif

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sebuah Praktik jual beli reyeng wadah ikan pindang di Wilayah Perindustrian Reyeng, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, yang cukup memiliki peran penting dalam ekonomi lokal, namun dalam hal ini sering kali menghadapi beberapa hambatan terkait monopoli yang merugikan pelaku usaha kecil, konsumen, dan persaingan pasar.

Penelitian ini berfokus pada 3 pertanyaan utama: 1) Bagaimana praktik monopoli jual beli reyeng wadah ikan pindang Pada Wilayah Perindustrian Reyeng Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, 2) Bagaimana analisis etika bisnis islam dalam praktik jual beli untuk mencegah monopoli Pada Wilayah Perindustrian Reyeng Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, dan 3) Bagaimana analisis hukum positif dalam praktik jual beli untuk mencegah monopoli Pada Wilayah Perindustrian Reyeng Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek?. Dalam mengakaji fokus penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan penggumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah memperoleh data kemudian dianalilis menggunakan teknik yang berlandaskan pada metode analisis data kulitatif, proses analisis data melibatkan pencarian dan pengorganisasian informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga dapat mengidentifikasi aspek-aspek penting yang perlu dipelajari dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik monopoli jual beli kerajinan reyeng (wadah ikan pindang) di Kecamatan Watulimo terjadi karena penguasaan produksi dan distribusi oleh satu pengepul besar yang ingin mengendalikan pasar. Pengepul ini membeli dari pengrajin dengan harga tetap yang sesuai harga industri, lalu menaikkan harga jual, sehingga menyulitkan pengepul lain bersaing. Akibatnya, pengepul lain tidak berani membeli karena harga tidak sesuai dengan pasar. Tindakan sepihak ini juga merugikan pengrajin yang sudah terikat kontrak dengan pengepul lain. Selain itu, pengepul luar daerah enggan masuk karena dominasi pasar oleh pengepul tersebut. Beberapa faktor penyebab monopoli ini antara lain: Kualitas produk : Produk yang bagus memicu persaingan tidak sehat, Permintaan pasar : Tingginya permintaan mendorong penguasaan pasar oleh pihak tertentu, Kelangkaan produk : Saat produksi menurun, terjadi persaingan tidak sehat yang memicu monopoli. 2) Menurut etika bisnis Islam, praktik monopoli oleh pengepul reyeng di Kecamatan Watulimo yang bertujuan menguasai pasar dan merusak harga sangat merugikan pengepul lain dan pengrajin. Islam melarang monopoli sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan hadist. Praktik tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kebebasan, dan persaingan sehat. Salah satu pengepul menetapkan harga sendiri dan mengikat pengrajin dengan

kontrak, sehingga membatasi pilihan dan merugikan pihak lain. Monopoli ini bertentangan dengan prinsip bisnis Islam karena menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi pengrajin serta pengepul kecil. Dalam islam juga sudah dijelaskan bahwa praktik monopoli adalah salah satu praktik jual beli yang dilarang dalam agama islam hal ini juga sudah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadist megenai larangan dilakukanya praktik monopoli, Dijelaskan dalam surat Ali Imran Ayat 187 dan Qs al-Hajj : 25, serta dalam Hadist Ma'mar bin Abdullah *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda yang *artinya: " Barangsiapa menimbun barang, maka ia berdosa."* (HR Muslim (1605). 3) Dalam hukum positif juga sudah banyak yang menjelaskan tentang larangan praktik monopoli, Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Undang-undang ini mengatur larangan terhadap monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, dengan pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang melarang pengusaha atau badan usaha melakukan praktek monopoli yang merugikan konsumen serta menghambat persaingan yang sehat dalam pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur larangan terhadap praktik monopoli yang dapat merugikan kepentingan umum.dan juga dalam pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang larangan praktik persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan pasar dan konsumen.. Dijelaskan juga dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang Mengatur aspek perdagangan di Indonesia, termasuk hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen dan mekanisme perlindungan pasar dari praktik perdagangan yang tidak sehat, dengan pasal 33 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat dalam perdagangan, yang bisa merugikan konsumen atau pelaku usaha lainnya. Dalam tindak pidana ekonomi ada 16 bentuk yang merujuk pada pelanggaran hukum yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, keuangan, dan bisnis, terutama tindak pidana ekonomi monopoli, Tindak pidana ekonomi monopoli adalah salah satu bentuk pelanggaran dalam dunia usaha yang sangat merugikan masyarakat dan ekonomi.ada beberapa upaya penyelesaian yang yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana ekonomi seperti, Pertama, penting untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, Kedua, regulasi yang ada perlu diperbarui dan disesuaikan agar mampu menjawab tantangan kejahatan ekonomi modern, Ketiga, pemanfaatan teknologi dalam proses hukum juga perlu ditingkatkan, Selain itu, kerja sama internasional menjadi elemen penting dalam menghadapi kejahatan ekonomi lintas Negara, Terakhir, peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan hukum dan sosialisasi juga perlu dilakukan.

ABSTRAC

Thesis entitled "Analysis of Monopolistic Practices of Buying and Selling Reyeng Pindang Fish Containers from the Perspective of Islamic Business Ethics and Positive Law (Study in the Reyeng Industry Area of Watulimo District, Trenggalek Regency)" was written by 'Yovi Sintya Sulistiyowati, NIM. 126101212159, with supervisor/promoter by Hiba Fajarwati, S.H., LL.M.

***Keywords**: Monopolistic Practices, Reyeng, Islamic Business Ethics, Positive Law*

This research is motivated by the practice of buying and selling reyeng pindang fish containers in the Reyeng Industry Area, Watulimo District, Trenggalek Regency, which has an important role in the local economy, but in this case it often faces several obstacles related to monopolies that harm small business actors, consumers, and market competition.

This research focuses on 3 main questions: 1) How is the monopoly practice of buying and selling reyeng pindang fish containers in the Reyeng Industry Area, Watulimo District, Trenggalek Regency, 2) How is the analysis of Islamic business ethics in buying and selling practices to prevent monopoly in the Reyeng Industrial Area, Watulimo District, Trenggalek Regency, and 3) How is the analysis of positive law in buying and selling practices to prevent monopoly in the Reyeng Industrial Area, Watulimo District, Trenggalek Regency?. In assessing the focus of the study, researchers used a qualitative research method by collecting data through observation, interviews, and documentation. After obtaining the data, it is then analyzed using techniques based on the method of skinative data analysis, the data analysis process involves searching and organizing information obtained through interviews, observations, and documentation, so as to identify important aspects that need to be studied and draw conclusions.

The results showed that: 1) The monopolistic practice of buying and selling reyeng crafts (pindang fish containers) in Watulimo Sub-district occurs because of the control of production and distribution by one large collector who wants to control the market. This collector buys from craftsmen at a fixed price according to industry prices, then raises the selling price, making it difficult for other collectors to compete. As a result, other collectors do not dare to buy because the price is not in line with the market. This unilateral action is also detrimental to artisans who are already under contract with other collectors. In addition, collectors outside the region are reluctant to enter because of the market domination by these collectors. Some of the factors causing this monopoly include: Product quality: Good products trigger unfair competition. Market demand: High demand encourages market control by certain parties. Product scarcity: When production decreases, unfair competition triggers monopoly. 2) According to Islamic business ethics, the practice of monopoly by reyeng collectors in Watulimo Subdistrict which aims to control the market and damage prices is very detrimental to other collectors and craftsmen. Islam prohibits monopoly as stated in the Qur'an and hadith. The practice does not reflect Islamic values such as justice, freedom and fair competition. One collector sets its own price and binds the artisans to a

contract, thus limiting choice and harming others. This monopoly is contrary to Islamic business principles because it creates injustice and losses for craftsmen and small collectors. In Islam, it has also been explained that monopolistic practices are one of the buying and selling practices prohibited in Islam, this has also been widely explained in the Qur'an and hadiths regarding the prohibition of monopolistic practices, explained in Surah Ali Imran Verse 187 and Qs al-Hajj : 25, as well as in the Hadith of Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu 'anhu that the Messenger of Allah sallallahu 'alaihi wa sallam said which means: "Whoever hoards goods is sinning." (HR Muslim (1605). 3) In positive law, there are also many that explain the prohibition of monopolistic practices, in Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition This law regulates the prohibition of monopoly and unfair business competition, with article 17 of Law No. 5 of 1999 which prohibits entrepreneurs or business entities from carrying out monopolistic practices that harm consumers and hamper fair competition in article 3 of Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition regulates the prohibition of monopolistic practices that can harm the public interest. Article 3 of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition regulates the prohibition of monopolistic practices that may harm the public interest, and Article 4 of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition regulates the prohibition of unfair business competition practices that may harm the market and consumers. It is also explained in Law No. 7 of 2014 concerning Trade which regulates aspects of trade in Indonesia, including the relationship between business actors and consumers and market protection mechanisms from unfair trade practices, with article 33 of Law No. 7 of 2014 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition in trade, which can harm consumers or other business actors. In economic crimes, there are 16 forms that refer to violations of the law relating to economic, financial and business activities, especially monopoly economic crimes, monopoly economic crimes are one form of violation in the business world that is very detrimental to society and the economy. There are several solutions that can be done to improve the effectiveness of handling economic crimes such as, First, it is important to increase the capacity of law enforcement officials, Second, existing regulations need to be updated and adjusted to be able to answer the challenges of modern economic crime, Third, the use of technology in the legal process also needs to be improved, In addition, international cooperation is an important element in dealing with transnational economic crimes, Finally, increasing public awareness through legal education and socialization also needs to be done.

الملخص

تحليل الممارسات الاحتكارية لبيع وشراء حاويات أسماك راينج بيندانج من منظور أخلاقيات "الأطروحة التي تحمل عنوان كتبها يوفي "الأعمال الإسلامية والقانون الوضعي (دراسة حالة في منطقة صناعة راينج في منطقة واتوليمو بمقاطعة ترينجاليك) سينتيا سوليستيوات نـــيـــم ١٢٦١٠١٢١٢١٥٩، مع مشرفة/مشرفة من قبل هبة فجرواتي، س.ح، ماجستير في القانون

الكلمات المفتاحية: الممارسات الاحتكارية، الراينج، أخلاقيات الأعمال الإسلامية، القانون الوضعي

الدافع وراء هذا البحث هو ممارسة بيع وشراء حاويات أسماك الراينج بيندانج في منطقة صناعة الراينج في منطقة واتوليمو بمقاطعة ترينجاليك التي لها دور مهم في الاقتصاد المحلي، ولكنها في هذه الحالة تواجه في كثير من الأحيان عدة عقبات تتعلق بالاحتكارات .التي تضر بالجهات الفاعلة في الأعمال التجارية الصغيرة والمستهلكين والمنافسة في السوق

يركز هذا البحث على ٣ أسئلة رئيسية: ١) كيف تتم الممارسة الاحتكارية لبيع وشراء حاويات أسماك اليرينج بيندانج في

يركز هذا البحث على ٣ أسئلة رئيسية: ١) كيف تتم الممارسة الاحتكارية لبيع وشراء حاويات أسماك اليرينج بيندانج في منطقة

, ٢) كيف يتم تحليل أخلاقيات الأعمال الإسلامية في ممارسات البيع والشراء ,رييننج الصناعية، منطقة واتوليمو، محافظة ترينجاليك لمنع الاحتكار في منطقة رييننج الصناعية، منطقة واتوليمو، محافظة ترينجاليك، و ٣) كيف يتم تحليل القانون الوضعي في ممارسات البيع والشراء لمنع الاحتكار في منطقة رييننج الصناعية، منطقة واتوليمو، محافظة ترينجاليك؟ استخدم الباحثون في تقييم محور الدراسة أساليب البحث النوعي من خلال جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق. وبعد الحصول على البيانات، يتم تحليلها بعد ذلك باستخدام تقنيات تعتمد على أسلوب تحليل البيانات الجلدية، وتتضمن عملية تحليل البيانات البحث وتنظيم المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات والملاحظات والتوثيق، وذلك لتحديد الجوانب المهمة التي تحتاج إلى دراسة واستخلاص .النتائج

أظهرت النتائج ما يلي:١) تحدث الممارسة الاحتكارية في بيع وشراء مشغولات اليرينج (حاويات أسماك البندانج) في مقاطعة واتوليمو الفرعية بسبب سيطرة جامع كبير واحد على الإنتاج والتوزيع، حيث يريد السيطرة على السوق. ويشتري هذا الجامع من الحرفيين بسعر ثابت وفقًا لأسعار الصناعة، ثم يرفع سعر البيع، مما يجعل من الصعب على الجامعين الآخرين المنافسة. ونتيجة لذلك، لا يجرؤ هواة الجمع الآخرون على الشراء لأن السعر لا يتماشى مع السوق. كما يضر هذا الإجراء الأحادي الجانب بالحرفيين المتعاقدين بالفعل مع جامعي التحف الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، يحجم جامعو التحف من خارج المنطقة عن الدخول بسبب هيمنة هؤلاء الجامعين على السوق. وتشمل بعض العوامل المسببة لهذا الاحتكار ما يلي: جودة المنتج: المنتجات الجيدة تؤدي إلى منافسة غير عادلة، الطلب في السوق: ارتفاع الطلب يشجع على سيطرة أطراف معينة على السوق، ندرة المنتج : عندما .ينخفض الإنتاج، تحدث منافسة غير عادلة تؤدي إلى الاحتكار

أظهرت النتائج ما يلي:١) بشكل عام، تنطوي عملية بيع وشراء حاويات أسماك البندانج اليندانج اليندانج على عدة خطوات مثل إنتاج اليندانج، وبيع اليندانج لهواة جمع الأسماك، وبيع اليندانج لمالك إنتاج أسماك البندانج، وشحن وتوزيع اليندانج، وإتمام الصفقة. (٢) إن وجهات نظر حرفيي الراينج لحاويات أسماك البندانج والتجار متضررة تماما من وجود الممارسات الاحتكارية، مع وجود

هذه الممارسة الاحتكارية يشعر العديد من الأطراف بخسارة الحرفيين وصغار التجار في هذه الحالة مما يجعل الحرفيين على استعداد لبيع مصنوعاتهم بأي سعر بينما صغار التجار على استعداد لشراء المصنوعات اليدوية بأرباح قليلة جدا لأن سعر السوق قد تضرر من قبل التجار غير المسؤولين الذين يريدون السيطرة على السوق. ٣) والاحتكار في الاقتصاد الإسلامي ليس محظوراً، فيمكن لأي شخص أن يمارس التجارة سواء كان هو البائع الوحيد (المحتكر) أو كان هناك بائعون آخرون ما داموا لا يخالفون القيم الإسلامية. والممنوع في هذه الحالة بالنسبة للاحتكار هو الاستكثار وهو أن يبيع سلعة بأقل مما ينبغي أن تكون عليه بحيث ترتفع الأسعار من أجل الحصول على أرباح فوق الأرباح العادية، وقد تقدم أن الاحتكار في الإسلام من ممارسات البيع والشراء المحرمة في وقد ورد في القرآن والأحاديث في تحريم الاحتكار أحاديث كثيرة في تحريم الاحتكار، كما في سورة آل عمران الآية .الإسلام

، وسورة الحج : ٢٥، وكذلك في حديث مَعْمَر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله . (أخرجه مسلم (١٦٠٥"مَنِ اكْتَنَزَ مَالًا فَهُوَ خَاطِئٌ"صلى الله عليه وسلم ما معناه ١٦٠٥

لسنة ١٩٩٩م بشأن حظر). وفي القانون الوضعي أيضاً الكثير مما يوضح تحريم الممارسات الاحتكارية، ففي القانون رقم ٥ الممارسات الاحتكارية والمنافسة التجارية غير العادلة، فقد نظم هذا القانون حظر الاحتكار والمنافسة التجارية غير العادلة، ففي منه حظر على رجال الأعمال أو كيانات الأعمال القيام بممارسات احتكارية تضر بالمستهلكين وتعرقل المنافسة المادة ١٧ بشأن حظر الممارسات الاحتكارية والمنافسة التجارية غير العادلة تنظم حظر الممارسات الاحتكارية التي العادلة في المادة ٣ يمكن أن تضر بالمصلحة العامة، وكذلك في المادة ٤ بشأن حظر الممارسات الاحتكارية والمنافسة التجارية غير العادلة. وتنظم المادة ٤ بشأن حظر الممارسات الاحتكارية والمنافسة التجارية غير العادلة حظر ممارسات المنافسة التجارية غير العادلة التي يمكن

وينظم القانون رقم ٧ لعام ٢٠١٤ بشأن التجارة جوانب التجارة في إندونيسيا، بما في ذلك العلاقة بين الجهات التجارية والمستهلكين وآليات حماية السوق من الممارسات التجارية غير العادلة، حيث تنص المادة ٣٣ على حظر الممارسات الاحتكارية والمنافسة التجارية غير العادلة في التجارة، والتي يمكن أن تضر بالمستهلكين أو الجهات التجارية الأخرى. وفي الجرائم الاقتصادية هناك ١٦ شكلاً من أشكال الجرائم الاقتصادية التي تشير إلى مخالفات القانون المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والمالية والتجارية، وخاصة الجرائم الاقتصادية الاحتكارية، فالجريمة الاقتصادية الاحتكارية هي أحد أشكال المخالفات في عالم الأعمال التي تضر بالمجتمع والاقتصاد. هناك العديد من الحلول التي يمكن القيام بها لتحسين فعالية التعامل مع الجرائم الاقتصادية مثل، أولاً، من المهم زيادة قدرة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ثانياً، يجب تحديث اللوائح الحالية وتعديلها لتكون قادرة على الاستجابة لتحديات الجريمة الاقتصادية الحديثة، ثالثاً، يجب أيضاً تحسين استخدام التكنولوجيا في العملية القانونية، بالإضافة إلى ذلك، يعد التعاون الدولي عنصراً مهماً في التعامل مع الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، وأخيراً، يجب أيضاً زيادة الوعي العام من خلال التثقيف القانوني والتنشئة .الاجتماعي